



P R A K A R S A

Welfare Initiative for Better Societies

ANNUAL REPORT 2018

Laporan Publik
Perkumpulan Prakarsa



www.theprakarsa.org

**ANNUAL REPORT
PERKUMPULAN PRAKARSA
2018**

KONSEP LAPORAN TAHUNAN 2018

Tahun 2018 merupakan tahun 'go international' dalam kerja-kerja kami. Pada tahun 2018, Perkumpulan Prakarsa lebih banyak kegiatan meeting, networking dan training dengan jaringan internasional. Prakarsa terlibat aktif baik sebagai peserta dan penyelenggara dalam meeting, training dan konferensi internasional. Langkah-langkah tersebut kami harapkan akan terus tumbuh pada tahun-tahun yang akan datang sehingga kapasitas, identitas, dan kontribusi Prakarsa sebagai lembaga penelitian juga aktif berkontribusi sharing knowledge bagi jaringan sehingga memiliki kapasitas research dan knowledge yang lebih baik.

Dengan memberikan lebih banyak perhatian pada sharing pengetahuan serta engagement khususnya dalam isu kebijakan fiskal, kebijakan sosial, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan, Prakarsa berkomitmen untuk menghubungkan antara pengetahuan dengan kebijakan.

TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN 2018

Penanggung Jawab	: Ah Maftuchan
Koordinator Tim	: Cut Nurul Aidha
Anggota Penyusun	: Herni Ramdlaningrum, Heryanah, Dia Mawesti, Widya Kartika, Eka Afrina, Dwi Rahayu Ningrum, Rahmanda Muhammad, Arini Rahayu, Erlin Setyowati, Anah Nurjanah dan Agus Susanto.
Layout dan design	: Bambang Nurjaman
Dikeluarkan pada	: Juni 2019

@copyright 2019

Diterbitkan oleh:
Perkumpulan Prakarsa
Jln. Rawa Bambu I Blok A No. 8-E
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Indonesia 12520

Tlp. 021-7811798,
Fax. 021-7811897
perkumpulan@theprakarsa.org
www.theprakarsa.org

TERHUBUNG DENGAN KAMI



www.twitter.com/theprakarsa



www.facebook.com/PerkumpulanPrakarsa



www.instagram.com/theprakarsa



Perkumpulan Prakarsa



www.theprakarsa.org

Terhubung dengan Inisiatif Kami:



www.responsibank.id



www.mpi-indonesia.org



DAFTAR ISI

KONSEP LAPORAN TAHUNAN 2018.....	i
TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN 2018	i
TERHUBUNG DENGAN KAMI	ii
KATA PENGANTAR	iv
PRAKARSA DALAM ANGKA	viii
STRUKTUR ORGANISASI.....	ix
BADAN PENGURUS.....	x
BADAN PELAKSANA HARIAN DAN STAF 2018	xii
PANEL AHLI DAN RESEARCHER ASSOCIATE	xx
1. KILAS PRAKARSA.....	1
1.1 Visi Misi Prakarsa	3
1.2 Kode Etik Prakarsa	3
1.3 Fokus Isu dan Pendekatan Prakarsa	5
2. KEGIATAN DAN CAPAIAN DI TAHUN 2018.....	9
2.1 Aktivitas Prakarsa Di Tahun 2018.....	9
2.2 Aktivitas Prakarsa Di Tahun 2018.....	10
3. JARINGAN DAN AFILIASI.....	17
3.1 Forum, Afiliasi Prakarsa & Research Associate	17
3.2 Kepercayaan Perguruan Tinggi Dalam Proses Magang.....	20
3.3 Lembaga Donor 2018	21
4. KELEMBAGAAN DAN KEUANGAN	22
4.1 Penguatan Internal Organisasi	22
5. PRAKARSA DALAM MEDIA Tahun 2018	24

KATA PENGANTAR



Saat ini, Indonesia telah dan sedang bergerak menuju negara maju. Dalam fora global, Indonesia semakin besar kontribusinya dalam berbagai ragam pembangunan. Mulai dari misi kemanusiaan di Rohingya sampai misi perdamaian di berbagai negara di bawah misi kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kepemimpinan Indonesia di Kawasan juga semakin kuat.

Capaian pembangunan Indonesia di level domestik sangat menggembirakan. Untuk kali pertama, angka kemiskinan turun menjadi satu digit yakni 9,82% pada Maret 2018. Badan Pusat Statistik dan berbagai lembaga internasional mencatat bahwa pendapatan per-kapita rata-rata per tahun sudah mencapai 3.927 dollar AS (Rp 56 juta). Artinya, Indonesia telah “naik kelas” menjadi negara berpendapatan menengah atas (*upper-middle income country*). Keberhasilan yang patut disyukuri karena ini adalah hasil kerja keras seluruh elemen bangsa, tidak hanya kontribusi pemerintah dan sektor bisnis, namun juga kontribusi organisasi masyarakat sipil dan seluruh rakyat.

Apakah Perkumpulan PRAKARSA pada tahun 2018 juga “naik kelas”? Mari kita temukan jawabannya dalam Laporan Tahun 2018 ini. Seperti halnya laporan tahunan sebelumnya, Laporan Tahun 2018 ini merupakan laporan dari aktifitas, perkembangan dan kiprah PRAKARSA selama setahun. Laporan ini berfungsi sebagai alat pertanggung-jawaban kami kepada Badan Pengurus PRAKARSA, donor, mitra kerja dan publik luas. Harapannya, apa yang telah kami kerjakan akan mendapatkan apresiasi, dukungan, kritikan dan masukan agar Prakarsa benar-benar “naik kelas”.

Tahun 2018 adalah “Tahun Akselerasi”. Akselerasi menjadi kelanjutan dari tuntasnya tahun konsolidasi pada 2017 yang lalu. Secara garis besar, menurut hemat Badan Pelaksana Harian Perkumpulan PRAKARSA, akselerasi berhasil dilakukan. Beberapa indikator utama yang dapat menjadi “alat verifikasi” dari klaim keberhasilan tersebut antara lain:

- (i) meningkatnya tata kelola organisasi dan sistem keuangan dengan indikator diraihinya opini auditor KAP S. Mannan, Ardiansyah & Rekan “WAJAR TANPA PENGECUALIAN” dalam semua hal material, posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- (ii) mengelola dana sebesar Rp11,6 miliar (kali pertama di atas Rp10 miliar dalam satu tahun fiskal), bandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp7,9 miliar;
- (iii) meningkatnya kapasitas organisasi dan jumlah staf sebanyak 15 orang;
- (iv) meningkatnya kepercayaan donor dan *stakeholders* serta meningkatnya perhatian publik terhadap Prakarsa;
- (v) berhasil melakukan pemantapan peran regional dan global: mengkoordinir CSOs global dalam Annual Meetings IMF/WB 2018 di Bali, menjadi “*organization hub*” dalam pembentukan Fair Finance Asia, memfasilitasi agenda Tax and Fiscal Justice Asia, menyelenggarakan capacity

building isu pajak bagi CSOs Asia, memfasilitasi study visit Participation Center (China CSOs) di Indonesia, dan lain-lain;

- (vi) berhasil menjaga dan meningkatkan kapasitas staf sebagai nara sumber: presentasi pada berbagai forum CSOs di Indonesia, presentasi di Universitas Melbourne, presentasi pada forumnya the German Development Institute (DIE), presentasi di Asian Europe People's Forum, dan lain-lain;
- (vii) mampu menjaga kepemimpinan isu: pajak dan illicit financial flows, jaminan sosial, keuangan berkelanjutan; mampu mengajukan isu-isu baru di kalangan CSOs: vokasi, kelanjutusiaan (elderly), dan *sin-tax*.

Dengan beberapa indikator tersebut, kami percaya diri bahwa tahun 2018 PRAKARSA telah “naik kelas”. Dalam pandangan kami, berkembang dan majunya organisasi masyarakat sipil merupakan salah satu prasyarat kemajuan suatu negara. Artinya, jika Indonesia semakin “naik kelas”, maka organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi *think-tank* seperti PRAKARSA juga harus terus menerus berusaha agar semakin “naik kelas”.

Kami bertekad untuk menjadi “*leading CSO-based think-tank*” di Indonesia. Dengan tekad itu, semoga ke depan peran kami di tingkat regional dan global akan semakin meningkat. Prakarsa berkomitmen untuk terus berpikir, bekerja dan berinisiatif untuk kondisi masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Prakarsa menunggu dukungan semua pihak untuk turut berpartisipasi dalam mewujudkan komitmen dan cita-cita kami.

Terima kasih kepada Badan Pengurus Prakarsa, kepada advisor Prakarsa, kepada research associate Prakarsa, kepada donor (BfdW, FF, Oxfam Novib, Oxfam di Indonesia, SOMO, Yayasan Tifa, University of Illinois at Chicago dan Hivos), mitra kerja koalisi dan semua pihak yang mendukung kerja-kerja kami selama ini. Terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada staf Prakarsa yang telah bekerja cerdas dan bekerja keras. Terima kasih untuk kritik dan saran yang datang kepada kami. Selamat membaca laporan ini!

Semoga tahun 2019 berpihak kepada kami, amin...

Jakarta Selatan, Mei 2019

Ah Maftuchan

Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa

PRAKATA BOARD, JARINGAN DAN MITRA PRAKARSA



**Prof. dr. Hasbullah
Thabrany, MPH, Dr. PH**
*Guru Besar Fakultas
Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia*

Berbagai studi yang menuju ke atau terkait pada negara kesejahteraan telah dilakukannya sejak lama. Setelah krisis akhir tahun 1990an, isu kesejahteraan dan keadilan menjadi sangat penting. Disitulah Prakarsa jeli melihat masalah dan peluang kajian. Tahun 2018 Prakarsa makin banyak masuk kepada kebijakan publik yang pro-poor. Saya kira ini kontribusi besar untuk masa depan bangsa.



Metta Dharmasaputra
*Co-founder dan Chief
Executive Officer
PT Katadata Indonesia*

Perkumpulan Prakarsa memberi warna dan kontribusi signifikan dalam sejumlah isu nasional dan internasional. Berkolaborasi dengan Katadata, kerja investigasi pajak batubara di Kalimantan mendapat perhatian besar dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk sejumlah instansi pemerintah, seperti Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian ESDM dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, di event internasional, Perkumpulan Prakarsa berperan penting dalam forum NGO di ajang IMF-World Bank Event yang diadakan di Bali.



**Bambang Shergi
Laksmono**
*Guru Besar Kebijakan Sosial
FISIP-Universitas Indonesia*

Saya memberikan apresiasi besar kepada Prakarsa yang menjadi salah satu lembaga pengkajian pembangunan yang mampu mendorong evidence-based planing and policy, kebijakan berbasis kajian ilmiah dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan publik yang akuntabel-rasional. Kajian Prakarsa terhadap pelaksanaan JKN sebagai contoh, merupakan kajian yang signifikan memberikan fakta dan analisis konseptual yang sangat diperlukan oleh stakeholder sistem kesehatan nasional.



Sigit Haryoko

Eselon III

Direktorat Jenderal Pajak

Kerja dan karya Perkumpulan Prakarsa telah memberikan kontribusi sebagai penguat dan informasi tambahan bagi pengambilan kebijakan fiskal maupun strategi dalam menjalankan administrasi perpajakan. Beberapa hasil penelitian dengan topik illicit financial flows dan rokok ilegal telah meningkatkan awareness atas masalah tersebut di lingkungan kami, dan berdasarkan pandangan kami juga pada lingkungan akademisi.



Prof. Frank J. Chaloupka

*Director of Health Policy
Center, University of Illinois
at Chicago*

Prakarsa has made great strides by entering into new areas of work including tobacco tax (in partnership with the University of Illinois at Chicago). This research work focused on estimating levels of illicit trade in tobacco products and complements the existing portfolio of fiscal policy work which had previously focused on fiscal justice.



PRAKARSA DALAM ANGKA



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

Website

Total Visit
59.228

Most Downloaded File on Neliti website
Arah dan Strategi Kebijakan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Indonesia

Social Media

Facebook 

Followers	3.631 (↑145)	Interaksi	6482
Jangkauan	86.012	Total Postingan	49

Twitter 

Tweets	53	Retweet	112
Tweet	61.450	Likes	157
Impressions		Engagement Rate	4.06%

Kegiatan

Lebih dari **21** kegiatan selama satu tahun baik di daerah, nasional maupun internasional

Media & Publikasi

Lebih dari **21** kegiatan selama satu tahun baik di daerah, nasional maupun internasional

- 4** Rilis media
- 2** Policy Brief / Factsheet
- 3** Laporan Publikasi

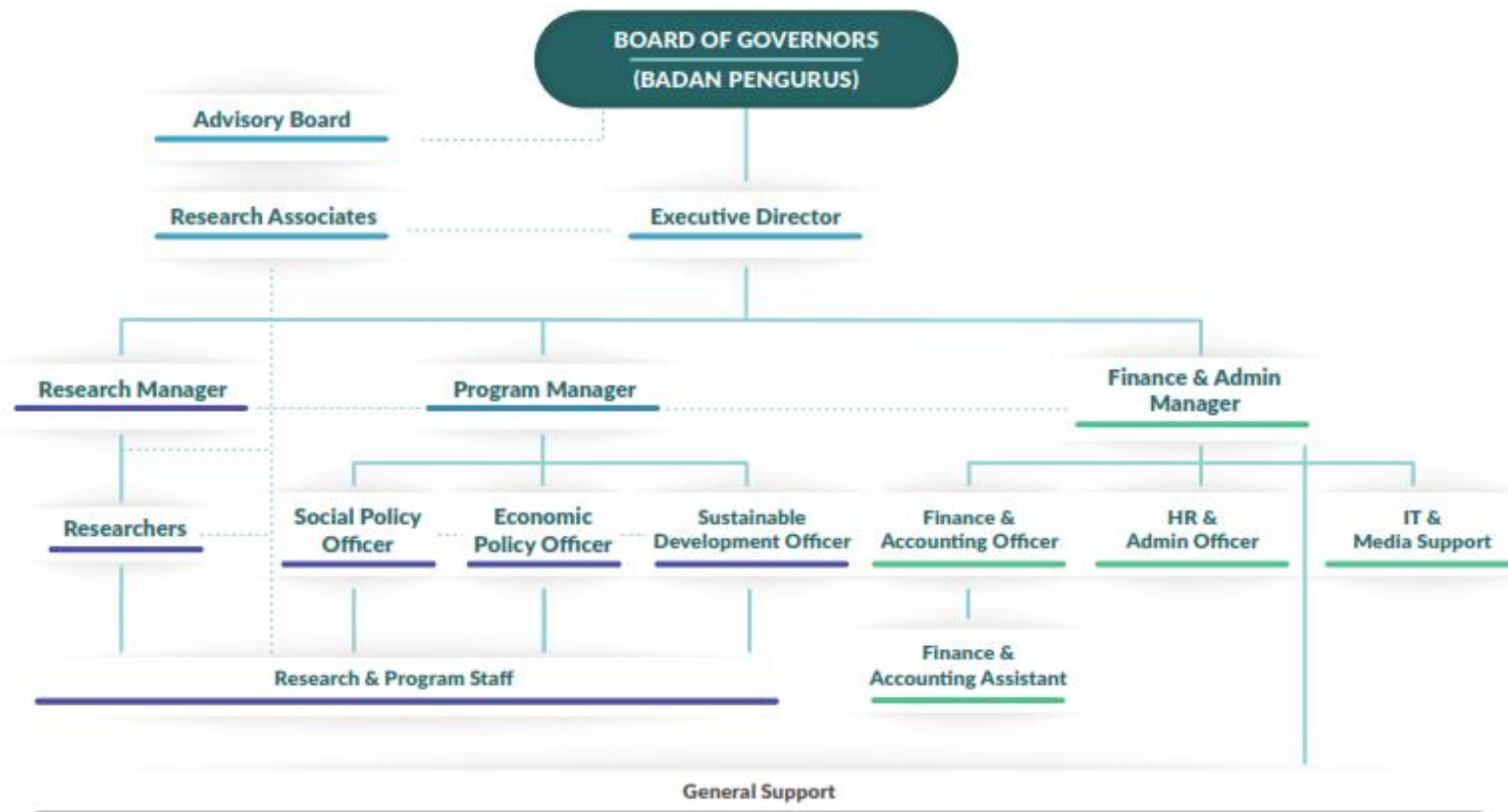
Anggaran

Rp 11.605.552.624
Dana yang dikelola oleh Perkumpulan Prakarsa tahun 2018



PRAKARSA
Welfare Initiative for Better Societies

STRUKTUR ORGANISASI PERKUMPULAN PRAKARSA (2019 - 2020)



BADAN PENGURUS



Sugeng Bahagijo
Ketua

Sugeng Bahagijo menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Prakarsa. Sehari-hari beliau adalah Direktur Eksekutif INFID. Di tingkat internasional, Sugeng Bahagijo merupakan anggota Steering Committee Open Government Partnership (OGP), anggota Steering Committee Asia Democracy Network (ADN) dan Asia Development Alliance (ADA).

Pada tahun 2006-2007, Sugeng Bahagijo dipercaya sebagai Penasihat Kebijakan Kementerian Kesejahteraan Sosial.



Ati Nurbaiti
Sekretaris

Sekretaris Dewan Pengurus Perkumpulan Prakarsa, Ati Nurbaiti, juga berkecimpung di dunia jurnalistik profesional di koran The Jakarta Post. Di samping itu, ia juga merupakan anggota Majelis Etik (ME) Nasional, Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) 2018-2020.



Yuyun Yunia Ismawati
Bendahara

Bendahara Dewan Pengurus Perkumpulan Prakarsa, Yuyun Yunia Ismawati, juga merupakan Direktur Yayasan Bali Fokus. Dia juga merupakan seorang dosen yang sekaligus aktivis lingkungan. Yuyun adalah focal point Indonesia untuk GAIA (Global Alliance for Incinerator Alternatives). Pada tahun 2009, ia meraih penghargaan Goldman Environmental Prize (the "Green Nobel")



Bagus Giripurwo (Alm)
Anggota

Anggota Dewan Pengurus Perkumpulan Prakarsa, Bagus Giripurwo, juga merupakan Dosen Sosiologi di Universitas Bengkulu. Dia juga seorang Pengamat Sosial.



Purnama Adil Marata
Anggota

Sebagai anggota Dewan Pengurus, Purnama Adil Marata juga merupakan konsultan profesional di bidang advokasi dan strategi kampanye, sustainable livelihood, dan hak-hak ketenagakerjaan. Dia juga merupakan anggota dewan pengawas Indonesia Berseru



Binny B. Buchori
Anggota

Sebagai anggota Dewan Pengurus, Purnama Adil Marata juga merupakan konsultan profesional di bidang advokasi dan strategi kampanye, sustainable livelihood, dan hak-hak ketenagakerjaan. Dia juga merupakan anggota dewan pengawas Indonesia Berseru

BADAN PELAKSANA HARIAN DAN STAF 2018



AH MAFTUCHAN
Direktur Eksekutif

Direktur Eksekutif Perkumpulan PRAKARSA periode 2015-2020. Meraih gelar sarjana hukum Islam dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan master ilmu pembangunan sosial dari FISIP Universitas Indonesia (UI). Maftuchan memperoleh IMF-sponsored Civil Society Fellowship Program 2017 & 2018.

Maftuchan adalah konsultan isu tata kelola pemerintahan yang baik di Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (2007-2008). Dia adalah anggota Kelompok Kerja SDGs di Kantor Staf Presiden (2016) dan anggota Delegasi Republik Indonesia untuk High Level Political Forum/HLPF on Sustainable Development Goals di United Nations New York (Juli 2018). Maftuchan adalah co-founder Forum Pajak Berkeadilan - Indonesia, co-founder Koalisi ResponsiBank Indonesia dan co-chair Tax and Fiscal Justice Alliance (TAFJA) Wilayah Asia Tenggara.

Isu utama yang digeluti antara lain: kemiskinan, ketimpangan, kesejahteraan, ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, jaminan sosial, kebijakan fiskal, tata kelola yang baik dan kerja sama pembangunan internasional.

Herni adalah Program Manager di Perkumpulan Prakarsa. Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dalam pengelolaan program pembangunan, Herni mempunyai keahlian di bidang perencanaan program, monitoring dan evaluasi program.

Sebelum gabung Prakarsa, Herni pernah bekerja di UNDP (United Nations Development Programme) Indonesia dan Zoological Society London (ZSL).

Herni lihai dalam mengatur jaringan multi-stakeholder di tingkat nasional dan internasional. Herni cakap dalam mobilisasi pendanaan program pembangunan dan proyek riset.

Pemegang gelar master bidang Kebijakan Publik dalam Kebijakan Sosial dari The Australian National University (ANU) Canberra ini mempunyai keahlian di bidang jaminan sosial, gender equity, child protection dan elder policy.



HERNI RAMDLANINGRUM
Program Manager



CUT NURUL AIDHA
*Research and Knowledge
Manager*

Nurul adalah Manager Riset dan Pengetahuan di Perkumpulan Prakarsa dan bertanggung jawab atas perencanaan, methodology dan output riset serta diseminasi hasil produksi pengetahuan Perkumpulan Prakarsa.

Nurul memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di organisasi profit maupun non profit antara lain WARSI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), International Finance Corporation (IFC) – the World Bank Group, Orix Indonesia Finance, School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia dan Crops for the Future-Nottingham University Malaysia Campus serta pengajar off-shore Foundation Program kelas bisnis dan ekonomi University of New South Wales (UNSW) dan University of Technology Sydney (UTS).

Peraih gelar sarjana Ilmu keuangan dari Saginaw Valley State University di Michigan dan master ekonomi pembangunan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini juga aktif sebagai Dosen Ekonomi Pembangunan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk perguruan tinggi swasta antara lain Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Unisadhunga di Jakarta

Heryanah berperan sebagai Finance and Administration Manager yang meraih gelar pendidikan strata 1 di bidang Ekonomi Manajemen di sebuah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIEI) di Provinsi Aceh.

Heryanah sudah memulai karir di lembaga non-profit sejak tahun 2002 di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan. Lalu pindah ke Provinsi Aceh dan selama tinggal di Provinsi Aceh telah bergabung di beberapa lembaga non-profit sampai Juni 2016. Kemudian memutuskan kembali ke kota Palembang dan kembali berkarir di Zoological Society of London (ZSL) sampai tahun 2017.

Bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan di Perkumpulan Prakarsa dan juga terhadap pemberi dana (donor). Juga melakukan asistensi dan memberikan peningkatan kapasitas kepada Finance and Accounting Officer, Finance and Accounting Assistant, HR and Admin Officer, IT and Media Support dan General Support.



HERYANAH
*Finance and Administration
Manager*



SETYO BUDIANTORO
Senior Researcher

Setyo Budiantoro (Budi) merupakan peneliti senior di bidang ekonomi pembangunan Prakarsa. Budi meraih gelar Master of Economics of development di International Institute of Social Studies of Erasmus University Rotterdam. Sebelumnya, ia menyelesaikan studi Teknik Mesin lalu mengikuti Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia. Budi juga sempat belajar di Oxford University (kerjasama dengan George Wahington University).

Budi memiliki pengalaman sebagai Expert Advisor di UNDP maupun menjadi narasumber di lembaga PBB lainnya. Budi pernah memimpin perkumpulan Prakarsa pada periode 2010-2015 dan menjadi Koordinator Aliansi Pajak Berkeadilan Asia Tenggara. Saat ini Budi menjabat tenaga ahli senior untuk Sustainable Development Goals di Bappenas.

Budi memiliki expert di bidang ekonomi pembangunan, ekonomi publik, kebijakan fiskal dan ekonometrika. Budi juga memiliki kemampuan kuat dalam complex problem solving skill dan menulis populer. Hingga saat ini Budi telah menulis beberapa buku dan sekitar 50 artikel ke berbagai media nasional terkemuka, baik berbahasa Indonesia dan Inggris (Kompas, Jakarta Post, Bisnis Indonesia, Investor Daily, Kontan, Media Indonesia dll).

Victoria meraih gelar Master of Development Studies dari University of Melbourne, Australia, dan saat ini sedang menjalani cuti belajar untuk mengambil gelar doktor di School of Social and Political Science (SSPS) di universitas yang sama, dengan beasiswa Australia Awards (AAS).

Sebelumnya, Victoria merupakan Manajer Program dan Riset di Prakarsa sampai awal tahun 2017, dimana ia menginisiasi dan memastikan implementasi dari berbagai proyek penelitian terkait isu-isu kebijakan sosial ekonomi dan pembangunan manusia seperti kesehatan, ketenagakerjaan, pendidikan, kemiskinan, serta isu pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait pengembangan sektor keuangan berkelanjutan di Asia dan Indonesia. Sebelum bekerja di Prakarsa, Victoria bekerja sebagai staf dan konsultan di berbagai lembaga pembangunan internasional di Indonesia seperti UN-World Food Programme, UNFPA, Oxfam dan ILO di berbagai wilayah di Indonesia, serta menjadi peneliti magang di lembaga kampanye anti-kemiskinan global, The Global Poverty Project di Melbourne, Australia.

Victoria berpengalaman menggunakan metode kualitatif dan mix-methods dalam berbagai penelitian baik mengenai fenomena-fenomena sosial maupun kebijakan dan banyak bekerjasama dengan peneliti dan tim kerja dari berbagai latar belakang keilmuan maupun kebangsaan.



VICTORIA FANGGIDAE
Senior Researcher



EKA AFRINA DJAMHARI
Social Policy Officer

Eka Afrina merupakan Social Policy Officer di Perkumpulan Prakarsa yang bertanggung jawab dalam mengelola program dan riset di isu kebijakan sosial. Eka lulus dari Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia sejak 2015. Selama kuliah ia aktif dalam pusat kajian kepemudaan dan ilmu kesejahteraan sosial, serta terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan di kampus.

Eka mempunyai pengalaman kerja lebih dari 5 tahun dalam riset dan program pemberdayaan masyarakat. Selain itu, ia pernah bekerja untuk membuat perencanaan organisasi dan berkoordinasi dengan mitra-mitra di tingkat daerah.

Eka memiliki kemampuan dalam menganalisis fenomena sosial di masyarakat terutama terkait isu perlindungan sosial. Ia juga dikenal sebagai peneliti kebijakan sosial yang mengkritisi dan memberikan opsi-opsi perbaikan kebijakan. Lebih lanjut, eka tertarik dalam penguatan jaringan dan advokasi berbasis bukti.

Dia memegang peran sebagai Sustainable Development Officer yang fokus pada riset dan advokasi kebijakan terkait tanggung jawab sektor swasta dan inisiatif multipihak dalam pembangunan. Dia juga adalah Koordinator Koalisi ResponsiBank Indonesia, bagian dari jejaring Fair Finance Guide International, yang mendorong perbaikan kebijakan dan praktik investasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan serta mendorong implementasi keuangan berkelanjutan di level nasional, regional, dan global.

Lulus dari Departemen Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2012, Dia mengawali karir tahun 2015 di Perkumpulan Prakarsa sebagai Media & Communication Officer dan Program & Research Assistant. Dalam lima tahun kiprahnya di Prakarsa, Dia mendalami keahlian riset, advokasi, manajemen program, membangun relasi dengan pemerintah maupun swasta, serta media dan komunikasi.



DIA MAWESTI
Sustainable Development Officer



WIDYA KARTIKA
Economic Policy Officer

Widya Kartika menjabat Economic Policy Officer sejak November 2016. Memiliki latar belakang pendidikan Ekonomi Pembangunan dari Universitas Airlangga Surabaya membuat Widya memiliki expertise penelitian kuantitatif bidang ekonomi.

Sebelum bergabung di Prakarsa, Widya telah memiliki pengalaman mengelola program dan penelitian di NGO Nasional dalam bidang ekonomi publik, kebijakan publik dan tata kelola khususnya anggaran daerah dan perpajakan.

Sebagai Economic Policy Officer ibu satu anak ini bertanggung jawab dalam pengelolaan program dan penelitian di bidang kebijakan fiskal dan perpajakan

Dwi Adalah lulusan Sarjana Pertanian Universitas Brawijaya dengan jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. Sejak 2016, Dwi bergabung di Perkumpulan Prakarsa sebagai Research and Program Assistant. Mulai 2018, Dwi bertanggungjawab sebagai Economic Researcher. Dwi bertanggungjawab dalam pelaksanaan penelitian dan pengelolaan pengetahuan dan informasi (knowledge management), khususnya di isu ekonomi pembangunan. Dwi bekerja pada penelitian dengan isu kemiskinan, keuangan berkelanjutan hingga aliran keuangan gelap.



DWI RAHAYU NINGRUM
Economic Researcher

Dwi is a bachelor of Agriculture from Brawijaya University, majoring Agriculture Social Economic. In 2016, Dwi joined in Perkumpulan Prakarsa as a research and program assistant. Start in 2018, Dwi works as an economic researcher. Dwi has a responsibility in conducting research and knowledge and information management, especially on the issue of development economics. Dwi majoring research on poverty, sustainable finance, and illicit financial flow.



IRVAN TENGGU HARJA
Program & Research Assistant (On Leave)

Irvan meraih gelar Sarjana Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Saat ini Irvan sedang menempuh pendidikan master di National Research Tomsk State University, Rusia, dengan beasiswa Pemerintah Federasi Rusia.

Pada tahun 2018, Irvan mengikuti Summer School di Public Administration Institute for Turkey and the Middle East, Ankara, Turki. Sebelum bergabung di Prakarsa, Irvan sempat menjadi asisten dosen dan tutor di International Program of International Relations – UMY dan peneliti lapangan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan – Universitas Gajah Mada. Dia juga aktif di serikat buruh, pernah menjabat sebagai wakil ketua Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia – Daerah Istimewa

Yogyakarta dan tenaga riset di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

Isu yang menjadi fokus Irvan selama bekerja di Prakarsa adalah isu kebijakan sosial di bidang ketenagakerjaan dan kesehatan, serta pembangunan berkelanjutan.

Rahmanda adalah Program & Research Assistant Perkumpulan Prakarsa. Sarjana Ilmu Ekonomi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada ini bertanggungjawab dalam membantu pelaksanaan program dan penelitian, khususnya di isu kebijakan ekonomi, fiskal, dan moneter.

Sebelum bergabung dengan Perkumpulan Prakarsa, Rahmanda pernah menjadi Asisten Dosen di FEB UGM dan magang di Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden. Rahmanda memiliki kompetensi di bidang makroekonomi, ekonomi internasional, dan ekonomi moneter. Pemikiran-pemikirannya seringkali muncul di berbagai media massa nasional.



**RAHMANDA MUHAMMAD
THAARIQ**
*Program & Research
Assistant*



ERLIN SETYOWATI
*Finance & Accounting
Officer*

Bertanggung jawab sebagai Finance and Accounting Officer, lulusan Sarjana Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Erlin memiliki banyak pengalaman di bidang pengelolaan keuangan sektor profit.

Meskipun pengalaman di sektor profit cukup dominan, namun Erlin mampu mengembangkan ilmunya dan dapat beradaptasi di organisasi non-profit. Bergabung di Perkumpulan Prakarsa sebagai Finance & Accounting Officer, Erlin bertanggung jawab dalam mengelola dan melaporkan keuangan organisasi.

Ia meraih gelar sarjana Psikologi dengan fokus utama pada Psikologi Industri Organisasi. Berkecimpung dalam bidang SDM lebih dari 3 tahun, Arini berpengalaman bekerja sebagai tim HR baik dalam konsultan, perusahaan, maupun lembaga.

Beberapa bidang SDM yang sempat dipegangnya meliputi talent management, organization development, industrial relations, payroll, prosedur, dan remunerasi.



ARINI RAHAYU
HR & Admin Officer



BAMBANG NURJAMAN
IT Dan Media Support

Bambang berperan sebagai IT dan Media Support untuk Perkumpulan Prakarsa. Sejak bangku SMA, ketertarikan dengan hardware maupun software akhirnya Bambang menempuh pendidikan ilmu komputer dan meraih gelar Sarjana Komputer di Universitas Mohammad Husni Thamrin.

Pengalaman bekerja yang digeluti yaitu sebagai IT maupun desain grafis sudah ditempuh sejak tahun 2011. Bekerja di sekolah Uniprep Junior College sebagai IT dan Designer. Mengajar sekolah nasional dan internasional di Unisadhuguna Business School dan Unisadhuguna International College (UIC), Jakarta. Dan sebagai freelancer IT di Prakarsa Ekatama Advisory.

Dalam keseharian di Perkumpulan Prakarsa, Bambang bertanggung jawab untuk mengurus seluruh perangkat keras maupun perangkat lunak dan mengelola sosial media serta website. Selain itu, membantu tim untuk mendesain seluruh kebutuhan publikasi atau konten lainnya.

Bertanggung jawab sebagai Finance and Accounting Assistant, lulusan Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta, memiliki pengetahuan yang baik di bidang akuntansi, audit dan cash-flow.

Anah membantu Finance Officer dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pelaporan keuangan organisasi.



ANAH NURJANAH
Finance and Accounting Assistant

Agus bergabung dengan Perkumpulan Prakarsa sejak 2008 setelah sebelumnya bekerja di perusahaan konsultan selama sepuluh tahun.

Secara umum Agus mendukung kebutuhan administrasi di dalam atau di luar kantor untuk semua kegiatan dalam Perkumpulan Prakarsa.



AGUS SUSANTO
General Support

STAF YANG PERNAH BERGABUNG PADA TAHUN 2018



ANGGARA YUDHA Z
*Program & Research
Assistant*

Anggara menempuh pendidikan di Universitas Indonesia pada jurusan Kesejahteraan Sosial. Semasa kemahasiswaannya, Anggara giat berorganisasi seperti Indonesia Berseru “Young and Locavore Indonesia” dan kini tengah menginisiasi komunitas kajian dan pendidikan gender “On Women Indonesia”.

Selama masa magang dan bekerja di Prakarsa, Anggara terlibat pada proyek Responsibank Indonesia yang merupakan bagian dari jejaring Fair Finance Guide International di Indonesia.

PESERTA MAGANG PADA TAHUN 2018



AQILATUL LAYYINAH

Merupakan mahasiswi Departemen Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia. Saat aktif menjadi mahasiswi, Aqila sempat menjadi staf Departemen Pendidikan dan Keilmuan BEM UI 2016. Aqila juga terpilih menjadi pengajar dalam Gerakan UI Mengajar angkatan 8 di Temanggung. Selain itu, Aqila juga aktif menjadi wakil koordinator Future Leader for Anti-Corruption Regional Jakarta batch 2.

Selama masa magang, Aqila terlibat dalam beberapa proyek diantaranya: proyek Responsibank Indonesia yang merupakan bagian dari jejaring Fair Finance Guide International di Indonesia dan proyek Welfare Initiative and Social protection for Elderly (WISE) Indonesia.

Wahyudi merupakan seorang yang menyenangi kegiatan sosial. Dia menimba ilmu di jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia. Selama menjadi mahasiswa, Wahyudi aktif berorganisasi dan juga aktif melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sampai saat ini Wahyudi aktif mengikuti program Despro (Desa Produktif) Etos Jakarta. Selama masa magangnya, Wahyudi terlibat pada proyek Welfare Improvement on Social Welfare for Elderly in Indonesia (WISE Indonesia) dibawah bimbingan Eka Afrina yang merupakan project officer of social policy di Perkumpulan Prakarsa.

Melihat dari minat perguruan tinggi yang merekomendasikan mahasiswanya untuk melakukan magang di Prakarsa, maka hal tersebut merupakan kepercayaan mereka terhadap Prakarsa sebagai think tank based NGO yang dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswanya.



WAHYUDI

PANEL AHLI DAN RESEARCHER ASSOCIATE

1. Prof. Andrew Rosser, Ph.D.
2. Prof. Dr. Sri-Edi Swasono
3. Prof. Dr. Hasbullah Thabrani
4. Prof. Dr. A. Erani Yustika
5. Dr. Bambang Ismawan (c)
6. Dr. B. Herry Priyono
7. Dr. Edi Suharto
8. Dr. A. Prasetyantoko
9. Dr. Poppy Ismalina
10. Dr. I. Praptoraharjo
11. Dr. Zulfan Tadjoeuddin
12. Dr. Sutoro Eko
13. Luhur Fajar Martha, M.SE
14. Paskal Kleden
15. Dr. Fachru Nofrian, Ph.D.
16. Dr. Ari Sujito
17. Dr. Berly Martawardaya



1. KILAS PRAKARSA

Berdirinya Perkumpulan Prakarsa diawali oleh titik keprihatinan atas terjadinya “kemarau gagasan” di kalangan aktor pembangunan non-pemerintah. Ada kejumudan cara pandang terhadap negara dan stagnasi pendekatan terhadap situasi Indonesia kekinian pascareformasi 1998. Organisasi masyarakat mengalami kemiskinan pasokan ide dan inovasi dalam bekerja. Tanpa ide-ide inovatif dan pendekatan baru, sumber legitimasi, kredibilitas dan kepemimpinan organisasi masyarakat sipil dalam kerja-kerja pembangunan, advokasi dan pemberdayaan akan tergerus atau bahkan hilang karena kurang relevan.

Para penggagas Perkumpulan Prakarsa meyakini bahwa “the role of civil society organizations” sangatlah penting dalam kehidupan berbangsa bernegara. Selain mampu berkontribusi dalam kerja-kerja advokasi langsung, organisasi masyarakat sipil terbukti telah menjadi aktor pengontrol yang cukup efektif bagi pemerintah dan sektor bisnis. Untuk meningkatkan peran penting tersebut, maka dibutuhkan organisasi masyarakat sipil yang mengambil peranan dalam produksi dan diseminasi pengetahuan. Dalam peranan seperti inilah PRAKARSA didirikan! Harapannya, kami akan mampu menjadi suppliers informasi, pengetahuan, pendekatan dan inisiatif-inisiatif lainnya.

Sejak berdiri pada Agustus 2004 sampai 2011, tag-line PRAKARSA adalah “Civil Society for Better Indonesia”. Tag-line ini sangat mencerminkan arah fokus kerja PRAKARSA, kami memilih kalangan

civil society sebagai sasaran utama. Kami memfokuskan diri pada kerja-kerja peningkatan the role of CSOs agar organisasi masyarakat sipil mampu melakukan advokasi kebijakan yang berbasis bukti. Selain itu, kami juga memfasilitasi terbangunnya forum pertukaran pengetahuan dan koalisi-koalisi dalam kerja-kerja mendorong peningkatan the role of the state dalam pemenuhan hak warga. PRAKARSA tidak tampil di depan namun mendorong dan memfasilitasi organisasi masyarakat sipil lainnya untuk mengambil peran di depan.

Setelah berjalan, kami perlu melakukan evaluasi, guna melihat sejauh mana langkah dan kontribusi kami. Pada tahun 2011, kami melakukan evaluasi eksternal atas perjalanan PRAKARSA, hasilnya sungguh mengejutkan. Mitra-mitra kami menginginkan kami bekerja lebih luas, mengambil peran langsung, selain memproduksi pengetahuan juga harus menjadi front-liner untuk mempromosikan pengetahuan, menjadi penghubung antar aktor pembangunan dan seterusnya. Akhirnya kami menyimpulkan bahwa kami harus menjadi think and do tank, produksi dan diseminasi pengetahuan sekaligus advokasi kebijakan berbasis pengetahuan atau bukti-bukti yang telah dihasilkan (evidences-based policy advocacy). Inilah titik tolak PRAKARSA mengubah tag-line menjadi “Welfare Initiative for Better Societies”.

Perkumpulan Prakarsa akhirnya memiliki peran yang sangat luas. Kami bekerja tidak hanya bersama organisasi masyarakat sipil namun juga bersama pemerintah, parlemen dan dunia bisnis. Namun, kami tetap menjadikan pengetahuan atau isu-isu sebagai poros transformasi sehingga kerja kami terfokus pada tiga isu utama: fiscal policy, social policy and sustainable development. Pada isu kebijakan fiskal keterlibatan Perkumpulan Prakarsa tidak hanya terfokus pada instrumen utama kebijakan fiskal namun juga “cabang-cabang” dari kebijakan fiskal yang terkadang lebih kompleks, misalnya mengkaji aliran keuangan haram (illicit financial flows), tax-treaty, sin-tax dan lainnya. Sebagai co-chair Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA) South-east Asia chapter, kami juga membangun kolaborasi dengan aktor internasional dalam mempromosikan keadilan pajak.

Pada isu kebijakan sosial, Perkumpulan Prakarsa tidak hanya berhenti pada isu jaminan sosial, pada 2018 kami juga merambah ke isu decent work, unpaid care work and vocational. Kami juga mengangkat isu just jobs dalam konteks revolusi industri 4.0. Kami juga sedang mengerjakan isu elderly sebagai inisiatif kami dalam mengantisipasi ageing society. Pada isu , pembangunan berkelanjutan, Perkumpulan Prakarsa sebagai aktor non pemerintah, berkomitmen untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). Selain itu, dalam isu sustainable development, kami mempunyai konsen pada responsible bank and investment. Sebagai bagian dari Fair Finance Guide International dan Fair Finance Asia, kami mempromosikan environmental, social and governance (ESG) dalam kegiatan bisnis perbankan di Indonesia.

Kami akan secara terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan demi mencapai visi organisasi untuk “menjadi lembaga kajian dan pengembangan yang mampu memelopori munculnya ide-ide inovatif dan transformatif dalam bidang kesejahteraan demi mewujudkan keadilan sosial” dan ke depan akan tetap memegang teguh cita-cita dan mimpi para pendiri.

1.1 Visi Misi Prakarsa

VISI

“Menjadi lembaga kajian dan pengembangan yang mampu memelopori munculnya ide-ide inovatif dan transformatif dalam bidang kesejahteraan demi mewujudkan keadilan sosial”

MISI

1. Melakukan kajian/riset tentang peran negara, masyarakat sipil dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas.
3. Memproduksi dan mempromosikan pengetahuan serta wacana baru tentang “pro welfare policy”.
4. Mengelola jaringan untuk meningkatkan efektivitas kerja.

1.2 Kode Etik Prakarsa

A. Keadilan dan kesejahteraan

Organisasi dan staf berkomitmen untuk melakukan pelaksanaan kerja, pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan secara berkeadilan dan mengutamakan upaya untuk menyejahterakan seluruh karyawan dalam organisasi. Sistem yang ditetapkan dalam organisasi akan memastikan terjadinya pendekatan yang obyektif, adil dan akuntabel dalam mengupayakan kesejahteraan karyawannya. Pemenuhan hak asasi manusia dan hak pekerja dijunjung dalam organisasi dalam relasi organisasi dengan karyawan dan mitra organisasi. Upaya meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan merupakan hal yang mendasar untuk produktivitas dan keberlanjutan organisasi.

B. Integritas

Organisasi dan staf melaksanakan pekerjaan yang dilakukan dengan penuh integritas. Integritas bermakna bahwa organisasi dan staf akan menjaga kejujuran dan memegang prinsip moral yang mendahulukan kepentingan bersama, akuntabilitas dan kejujuran dalam praktik kerjanya. Staf Prakarsa sesungguhnya mewakili organisasi. Dengan demikian staf harus menyadari bahwa dalam perilaku yang dibawakan staf menjadi bagian dari organisasi.

C. Loyalitas

Organisasi akan mengupayakan lingkungan kerja yang kondusif bagi staf untuk belajar, tumbuh dan produktif dalam pekerjaannya. Hal ini dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa investasi pada sumberdaya manusia merupakan kewajiban untuk membangun keterikatan dan kesetiaan staf terhadap organisasi. Staf berupaya untuk menjaga wibawa, kepentingan dan mandat organisasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Staf mengetahui posisi organisasi dalam seluruh kerja advokasi yang dilakukan oleh organisasi dan mendukung kerja-kerja advokasi tersebut. Staf harus melakukan segala upaya untuk mempromosikan kepentingan yang baik bagi organisasi.

D. Disiplin

Organisasi akan menegakkan kedisiplinan, dengan menetapkan kebijakan secara transparan dan mengambil tindakan saat terjadi pelanggaran. Proses akan dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Semua staf mematuhi dan menyesuaikan diri dengan petunjuk dan peraturan organisasi, baik dengan maupun tanpa pengawasan. Jika terjadi pelanggaran, dan perselisihan, seluruh staf harus menjaga itikad baik untuk mencari jalan keluar dan solusi yang baik bagi kepentingan bersama.

E. Toleransi

Organisasi berkomitmen untuk menjadi lembaga yang inklusif dan mandiri dalam lingkup kerja *civil society organization*. Dengan demikian, organisasi memastikan posisi dan arah strategis organisasi akan mengutamakan persatuan bangsa dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Seluruh staf dan organisasi turut bersikap penuh toleran terhadap perbedaan dalam dan diluar organisasi. Dalam perbedaan pendapat, semua staf dan organisasi harus saling menghormati dan santun dalam mengupayakan terjadinya dialog antar pribadi.

F. Partisipatif

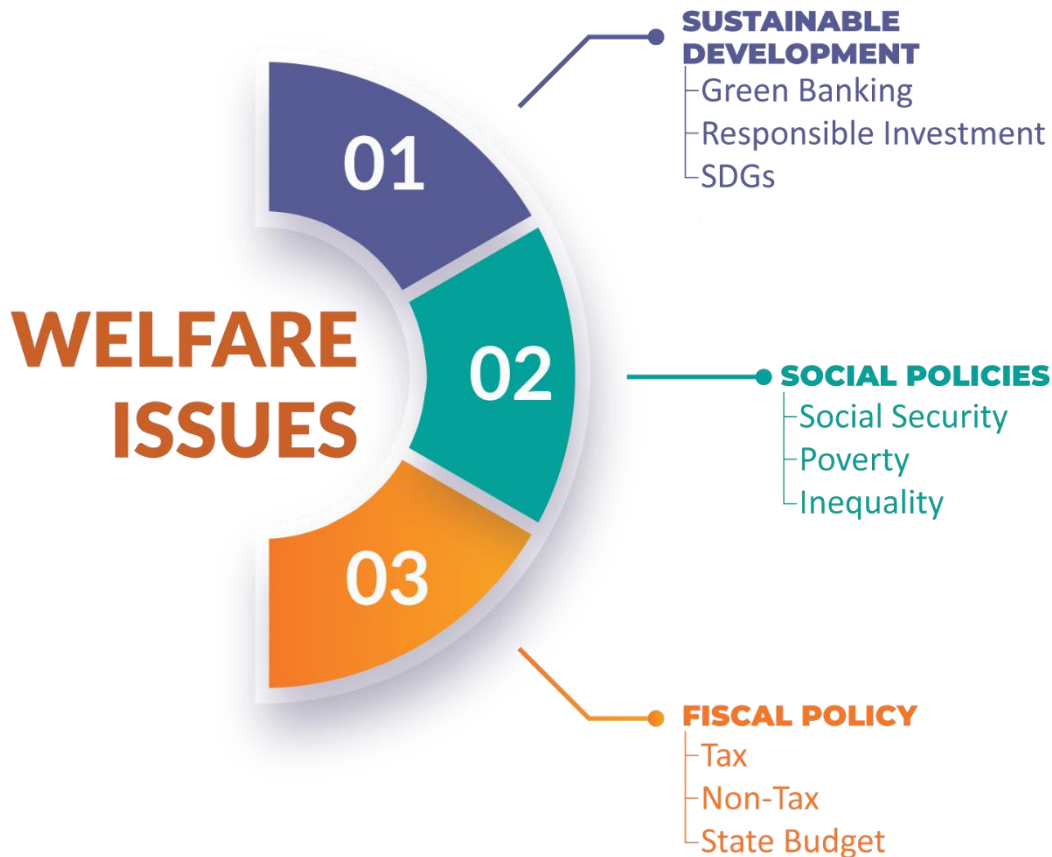
Organisasi berkomitmen untuk mendorong lingkungan kerja yang partisipatif dengan landasan bahwa semua pihak memiliki kapasitas dan tekad untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi. Baik dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi, pendekatan partisipatif akan diupayakan. Pendekatan ini turut diterapkan dalam relasi eksternal organisasi dengan pihak lainnya, termasuk donor, pemerintah, parlemen, rekan CSO, akademisi dan ahli lainnya.

G. Anti suap dan korupsi

Sebagai salah satu bentuk perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk menegakkan etika anti-suap dan korupsi dalam kebijakan organisasi, baik secara keuangan maupun relasi organisasi.

1.3 Fokus Isu dan Pendekatan Prakarsa

A. Tiga fokus area Perkumpulan Prakarsa



FISCAL POLICY

Perkumpulan Prakarsa meyakini bahwa pajak sangatlah vital untuk sumber pendapatan negara, instrumen mengurangi ketimpangan dan menegakkan kemandirian. Anggaran juga sangat penting untuk pembangunan dan kemajuan bangsa. Sayangnya, pajak dan anggaran berkeadilan (fiskal berkeadilan) hingga kini masih jauh dari harapan. Penerimaan pajak masih jauh dari optimal dan prioritas kebijakan anggaran yang masih belum tepat adalah tantangan yang mesti dihadapi pada saat ini.

Kajian dan riset kebijakan fiskal berkeadilan (fiscal justice) telah dituangkan dalam bentuk buku, policy brief, policy review, factsheet dan audio visual. Anggaran Pro-Kaum Miskin (2009) dan Anggaran Pro Rakyat Miskin: Panduan untuk Jurnalis (2012) adalah terbitan pionir mengenai anggaran yang memihak di Indonesia. Perkumpulan Prakarsa yang termasuk jaringan Global Alliance for Tax Justice juga terlibat menerbitkan Tax Justice Advocacy Toolkit yang kini telah diterjemahkan pula dalam bahasa Indonesia.

SOCIAL POLICY

Perkumpulan Prakarsa meyakini bahwa kesejahteraan warganegara merupakan tujuan dan sekaligus sarana kemajuan sebuah bangsa. Isu-isu strategis mengenai pembangunan manusia seperti kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, dan ketenagakerjaan adalah hal-hal sentral dalam kebijakan kesejahteraan.

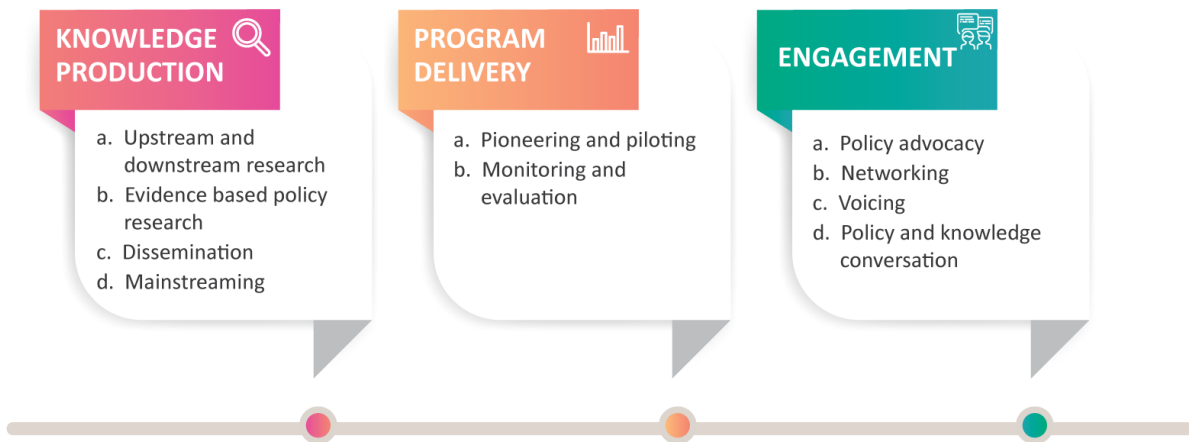
Perkumpulan Prakarsa berpandangan bahwa kemiskinan bukan sekedar masalah kekurangan, namun juga mencakup persoalan keadilan. Kemiskinan tidak cukup diukur hanya dari segi ekonomi saja, namun bersifat multidimensi. Kemiskinan adalah deprivasi terhadap kapabilitas manusia. Oleh sebab itu kami melakukan penghitungan mengenai Multidimensional Poverty Index (MPI). Persoalan ketimpangan juga lebih luas dari kesenjangan ekonomi karena menyangkut akses dan kesempatan. Ketimpangan terjadi karena kebijakan dan instrumen redistribusi kurang berjalan baik. Oleh sebab itu kami juga melakukan riset dan advokasi kebijakan mengenai kewirausahaan, ketenagakerjaan, inklusi keuangan, dan pendidikan vokasi.

Perkumpulan Prakarsa telah menerbitkan beberapa buku dan memproduksi berbagai paper dan artikel mengenai reformasi kebijakan kesejahteraan, diantaranya adalah *Mimpi Negara Kesejahteraan* (2005) dan *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia* (2009) yang menjadi textbook di perguruan tinggi. Perkumpulan Prakarsa kini menurunkan cita-cita besar negara kesejahteraan dalam kajian, riset dan advokasi mengenai reformasi kebijakan kesejahteraan.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Tercapainya kesejahteraan manusia dengan memastikan keberlanjutan sumber daya alam yang kini makin terbatas adalah sebuah tantangan jaman. Perkumpulan Prakarsa melakukan kajian dan advokasi berkaitan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan melalui pemetaan kebijakan ekonomi hijau, kajian green economy, greening fiscal decentralization dan banking/financing for sustainable development. Perkumpulan Prakarsa terlibat menginisiasi Green Economy Caucus (GEC) di Dewan Perwakilan Rakyat dan kini mengembangkan peringkat bank yang melakukan (less) responsible investment.

B. Pendekatan Prakarsa

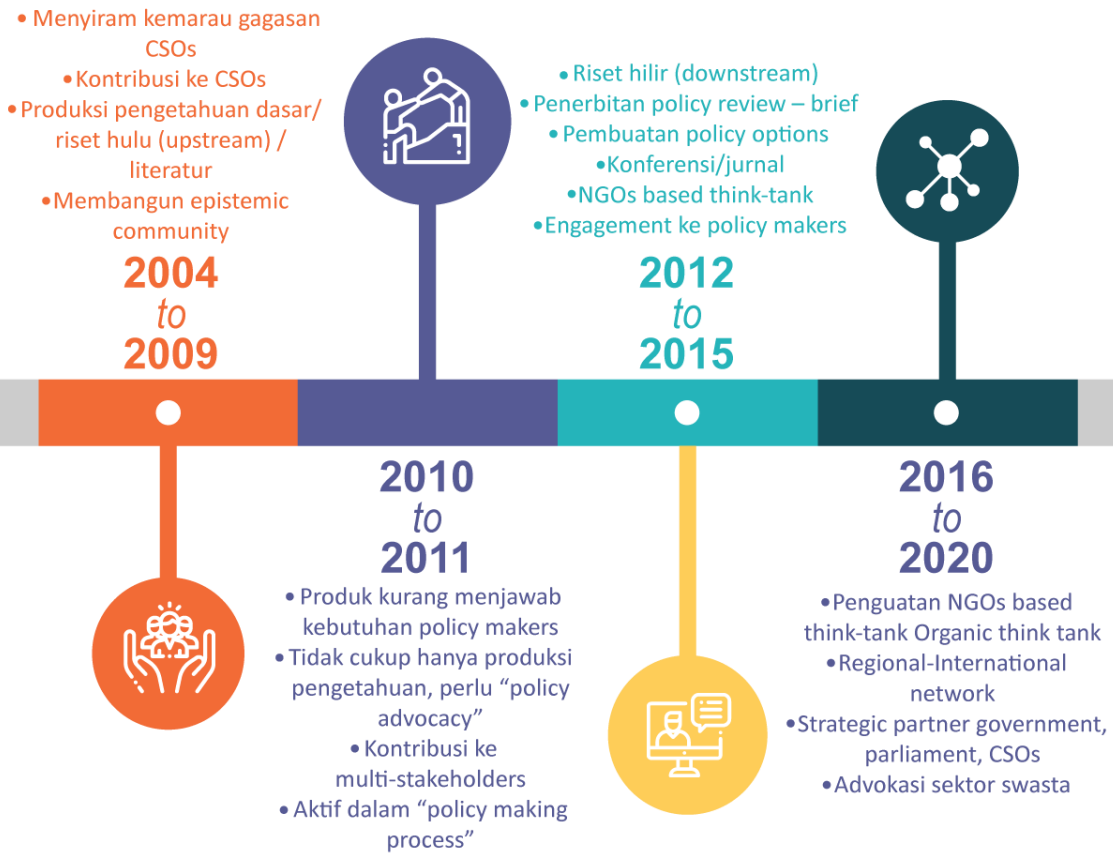


Knowledge Production. Perkumpulan Prakarsa sebagai lembaga penelitian berkomitmen untuk terus memproduksi pengetahuan melalui riset sebagai *evidence-based policy recommendations* bagi para perencana atau pembuat kebijakan. Prakarsa bergerak dalam pengembangan riset dari hulu ke hilir. Riset yang dilakukan berupaya melihat keberhasilan kebijakan, meng-*highlight* bukti-bukti yang menunjukkan kesenjangan kebijakan, anggaran, sistem monitoring dan evaluasi kebijakan atau program. Output yang dihasilkan berupa *research report/paper, policy review, policy brief, factsheet, infografis, dan article journal*. Selanjutnya Prakarsa juga aktif melakukan desiminasi hasil riset sebagai bagian dari upaua mainstreaming sebuah isu kebijakan.

Program Delivery. Prakarsa sebagai pengagas atas ide-ide isu kebijakan sosial, menggunakan strategi advokasi kolektif untuk mengadvokasikan isu-isu yang menjadi fokus lembaga dengan menggandeng organisasi masyarakat sipil lainnya untuk isu tertentu dalam suatu forum atau koalisi bersama. Suara kolektif dianggap lebih kuat daripada suara tunggal (*self-advocacy*) saat kampanye berjalan. Menjadi bagian dari kelompok advokasi kolektif dapat membantu Prakarsa dalam memperjuangkan masalah atau isu yang kompleks dan berat. Monitoring dan evaluasi kebijakan sosial juga dilakukan. Kelompok organisasi lainnya juga dapat memperoleh manfaat dukungan sumber daya dan bantuan terampil dari koalisi advokasi kolektif.

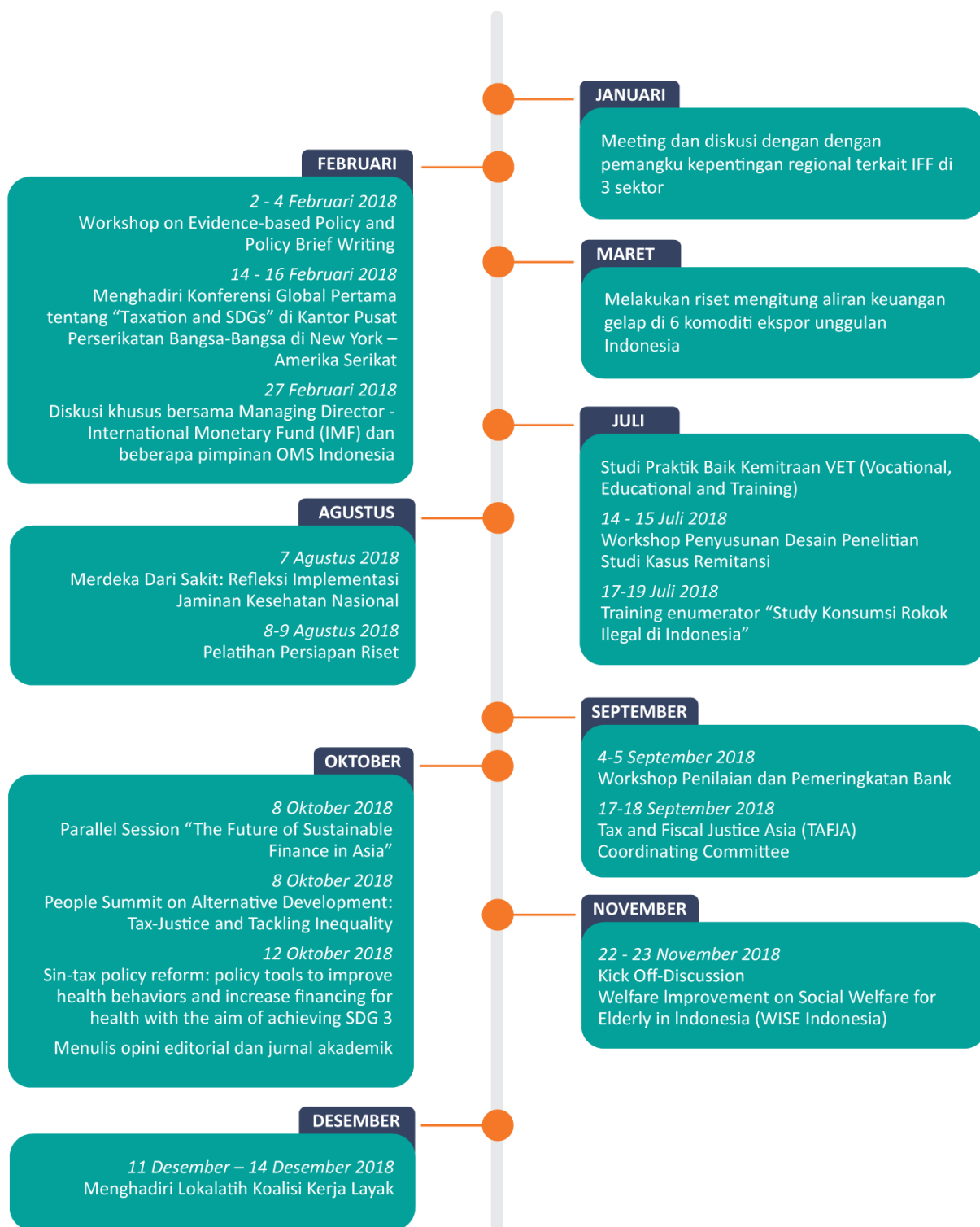
Engagement. Perkumpulan Prakarsa membangun hubungan yang baik dan berkomunikasi secara aktif dengan lembaga-lembaga pemerintah, parlemen, otoritas keuangan, perguruan tinggi dan lembagalembaga penelitian nasional/daerah di Indonesia dan luar negeri, organisasi masyarakat sipil (nasional, daerah dan internasional), sektor swasta, kedutaan besar, serta organisasi internasional untuk memperkuat usaha advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Perkumpulan Prakarsa. Prakarsa juga aktif terlibat dalam berbagai forum dalam dan luar negeri untuk menyuarakan perbaikan kebijakan yang berlaku.

Transformasi kelembagaan Prakarsa



2. KEGIATAN DAN CAPAIAN DI TAHUN 2018

2.1 Aktivitas Prakarsa Di Tahun 2018



2.2 Aktivitas Prakarsa Di Tahun 2018

SOCIAL POLICY



IMPLEMENTASI PROGRAM UHC DI INDONESIA DAN PENGUATAN KEUANGAN PROGRAM UHC DI TINGKAT REGIONAL

Riset mengenai implementasi program UHC di Indonesia dilakukan dengan field research di Mamuju, Sulbar; Kupang, NTT; Pandeglang; Banten dan Kab. Semarang; Jateng

Riset mengenai implementasi program UHC di Indonesia dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara kepada peserta JKN maupun penyedia layanan kesehatan. Selain itu, studi literatur melalui hasil penelitian terdahulu juga digunakan dalam riset ini

ADVOKASI

Adanya out of pocket yang dikeluarkan oleh masyarakat termasuk PBI. Saat ini permasalahan lainnya juga tengah dilami oleh BPJS kesehatan adalah mengenai keberlanjutan JKN karena deficit yang terjadi terus menerus. Strategi yang dilakukan dalam project ini antara lain yakni:

1. Melakukan riset alternative financing di 6 daerah
2. Mengembangkan tools untuk monitoring secara partisipatif
3. Memproduksi media advokasi dengan melibatkan jaringan
4. Melakukan kegiatan diskusi dan networking sebagai upaya advokasi kolektif

JARINGAN

1. Yasmib (Kab. Mamuju)
2. LK2P (Kab. Pandeglang)
3. PIAR (Kota Kupang)
4. PERCIK (Kab. Semarang)
5. PELKESI
6. Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial UI
7. YKP
8. TURC
9. SKP Ekonom

CAPAIAN



Hasil Riset Berupa Buku Dan Policy Brief



PrakarsaTalk #2 Merdeka dari sakit: Refleksi JKN



Expert Discussion National Health Insurance Issue

MENDORONG KEBIJAKAN KERJA LAYAK UNTUK ANAK MUDA DAN PEREMPUAN DALAM RANGKA PENURUNAN KETIMPANGAN DAN PENCAPAIAN SDGS

Survey yang dilakukan mengenai need assessment anak muda dan perempuan dalam kerja layak di 5 Kabupaten/Kota di Indonesia

Kegiatan diskusi yang dilakukan merupakan kelanjutan advokasi dari hasil survey yang dilakukan mengenai need assessment anak muda dan perempuan dalam kerja layak di 5 Kabupaten/Kota di Indonesia. Kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat sipil dan jurnalis dalam mendorong perluasan kesempatan kerja dan kerja layak.

ADVOKASI

1. Menggunakan pendekatan berbasis hak (rights-based approach) dan critical engagement yang berbasiskan pada evidence (evidence-based policy advocacy) terhadap pengambil kebijakan baik di nasional maupun di lima kabupaten/kota.
2. Meningkatkan kapasitas masyarakat sipil baik di nasional maupun daerah.
3. Memperluas dukungan dari berbagai pihak dengan menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya publik dan menarik publik baik media, akademisi maupun swasta

JARINGAN

1. INFID
2. Perkumpulan Prakarsa
3. Lakpesdam
4. NU
5. P3M
6. IRE.

CAPAIAN



Diskusi Publik
Merespon Forum Ekonomi Dunia 2018: Tantangan Penurunan Ketimpangan Ketenagakerjaan di Indonesia



Diskusi Publik dan Konferensi Pers
Tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Kesiapan Indonesia

CAPAIAN



Radio Talkshow Strategi dan Cara menurunkan Ketimpangan melalui Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)

WELFARE IMPROVEMENT ON SOCIAL WELFARE FOR ELDERLY IN INDONESIA (WISE INDONESIA)

Riset ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kebijakan dan program yang efektif

Skema nasional untuk jaminan sosial telah memprakarsai kebijakan menjanjikan tertentu untuk merespons dan mempersiapkan orang tua di tingkat individu. Namun demikian, rencana strategis nasional dan tampaknya belum cukup untuk memastikan bahwa penatua termasuk dalam rencana untuk mencapai kesejahteraan mereka di masyarakat.

ADVOKASI

1. Penelitian yang dapat memberikan masukan rekomendasi yang lebih inovatif
2. Desiminasi hasil riset kepada stakeholder di tingkat nasional dan daerah
3. Pelibatan CSO lain yang bergerak di isu lansia

CAPAIAN



Kegiatan ekspert diskusi WISE Indonesia

FISCAL POLICY



PROMOTING BETTER REDISTRIBUTION OF DOMESTIC RESOURCES THROUGH TAX JUSTICE IN INDONESIA

Menyoroti Aliran Keuangan Gelap di Enam Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia Tujuan dari riset ini adalah menghitung besaran under invoicing ekspor Indonesia dan potensi kehilangan penerimaan negara akibat praktek under invoicing ekspor dari enam komoditas unggulan yaitu batubara, tembaga, karet, minyak sawit, kopi dan krustacea dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif

1. Mengitung aliran keuangan gelap di 6 komoditi ekspor unggulan Indonesia
2. Mempublikasikan dan melakukan diseminasi hasil perhitungan aliran keuangan gelap di 6 komoditas
3. Meeting dan diskusi dengan pemangku kepentingan regional terkait IFF di 3 sektor
4. Mengorganisir pertemuan jaringan regional CSO terkait keadilan pajak dan IFF
5. Menulis opini editorial dan jurnal akademi

ADVOKASI

Advokasi yang dilakukan bertujuan agar pemerintah menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam setiap kebijakan pajak dan tata kelola perpajakan untuk memperbaiki redistribusi pendapatan. Kegiatan di dalam project ini dilakukan di beberapa lokasi yaitu Jakarta, Bali dan Bangkok

JARINGAN

1. Publish What You Pay Indonesia
2. Indonesia Corruption Watch
3. Transparency International Indonesia
4. Lokataru Foundation
5. Asosiasi Perkumpulan Usaha Kecil (ASPUK)
6. Indonesia for Global Justice
7. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
8. Aliansi Jurnalis Independen Jakarta
9. Indonesia Legal Roundtable

CAPAIAN

1. Menyelenggarakan diskusi dengan tema keadilan pajak dalam outside event Annual Meeting IMF/WB di Bali
2. Mengkoordinasikan pertemuan tahunan TAFJA dalam mempersiapkan general assembly TAFJA
3. Mumpublish paper Economic Political of EITI dalam jurnal akademik
4. Menyelesaikan olah data aliran keuangan gelap di 6 komoditas ekspor unggulan
5. Hasil Riset

TOBACCO TAX RESEARCH AND ADVOCACY IN INDONESIA

Menyajikan research dan data untuk mengadvokasi kenaikan tarif cukai rokok di Indonesia melalui Studi Rokok Ilegal di Indonesia: Survey di 6 Kabupaten di Indonesia

Tingginya angka prevalensi merokok di Indonesia telah menyebabkan beban kesehatan dan ekonomi yang ditanggung baik individu dan keluarga menjadi sangat tinggi. Data Susenas menunjukkan bahwa 30-35% pengeluaran keluarga tertinggi digunakan untuk membeli rokok. Riset akan menghitung Menghitung besaran rokok ilegal di Indonesia melalui survey konsumen Mengidentifikasi faktor yang menyebabkan konsumsi rokok ilegal Melihat respon perokok terhadap kenaikan harga rokok di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Malang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Gowa, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Banyumas

ADVOKASI

Advokasi dilakukan berdasarkan evidence-based research dalam rangka mendukung kenaikan tarif cukai rokok dan diseminasi hasil kajian kepada publik dan pembuatan kebijakan

CAPAIAN

1. Menyelesaikan penelitian rokok ilegal di Indonesia
2. Menyelenggarakan sesi diskusi dalam Civil Society Policy Forum Annual Meeting IMF/WB
3. Menjadi pembicara dalam Asia Pacific Conference on Tobacco di Bali
4. Melakukan sharing knowledge dengan Indonesia Tobacco Control Network
5. Menjalni relasi dengan BKF dan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan
6. Hasil riset

JARINGAN

1. CTFK
2. PKJS UI
3. LPEM UI
4. FAKTA
5. IAKMI
6. Ahmad Dahlan Tobacco Resource Center
7. Muhammadiyah Tobacco Resource Center
8. AJI Jakarta
9. CISDI
10. Lentera Anak
11. JP3T
12. WHO Indonesia

SUSTAINABLE DEVELOPMENT



OXFAM

SDGS BASELINE STUDY DI TIGA KABUPATEN/KOTA

Riset SDGs baseline dilakukan dalam rangka mengukur dan melaporkan kapasitas dan kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi SDGs Tujuan No. 1, 5, dan 10 di 3

Riset SDGs baseline dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh data sekunder yang tersedia di Nasional dan Lokal (Data Bappenas, Bappeda, BPS, TNP2K dll) dan juga data primer yang dilakukan melalui In Depth Interview dengan pemangku kebijakan, akademisi, sektor swasta serta CSOs dan WROs di Kabupaten Pangkajene & Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

ADVOKASI

Laporan baseline digunakan untuk mendukung kapasitas CSO (Civil Society Organization) dan WRO (Women Rights Organization) lokal agar dapat melakukan advokasi kebijakan untuk pencapaian SDGs dan mendorong akuntabilitas pemerintahan.

JARINGAN

Jaringan yang terbentuk pada saat penelitian SDGs baseline terdiri dari partner kerja Oxfam di Indonesia yaitu:

1. YBC
2. YKPM
3. SSP



CAPAIAN

1. Diseminasi hasil riset di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Kabupaten Timor Tengah Selatan
2. Hasil riset: Laporan SDGs baseline



OXFAM
Novib

FAIR FINANCE GUIDE INTERNATIONAL

ResponsiBank Indonesia (Fair Finance Indonesia) mengirimkan Complaint Letter kepada ING Bank terkait pembiayaan PLTU Cirebon yang tidak sesuai dengan komitmen ING untuk menghentikan pembiayaan energi batu bara.

WALHI dan Prakarsa sebagai bagian dari koalisi ResponsiBank Indonesia bekerjasama dengan Fair Finance Japan dan Fair Finance Netherland pada kampanye untuk untuk menyerukan JBIC dan ING untuk menghentikan pembiayaan terhadap PLTU di Cirebon untuk karena menimbulkan dampak negatif sosial dan lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Selain itu, energi kotor dari batubara juga melanggar komitmen Paris Agreement mengenai perubahan iklim.

CAPAIAN

Engagement dengan ING Bank terkait pembiayaan batubara di PLTU Cirebon

JARINGAN

1. Prakarsa
2. WALHI
3. ICW
4. INFID
5. Publish What You Pay
6. YLKI
7. TUK
8. Lokataru
9. INDIES
10. Kemitraan



BANK ASSESSMENT – PENILAIAN DAN PEMERINGKATAN BANK 11 BANK YANG BEROPERASI DI INDONESIA BERDASARKAN KEBIJAKAN KREDIT DAN INVESTASI

Metodologi dan draft hasil penilaian disosialisasikan dan digunakan sebagai salah satu acuan dalam advokasi implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia kepada OJK dan lembaga keuangan

Details Kegiatan:

1. Pelatihan metodologi bank assessment bekerjasama dengan Profundo
2. Workshop Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk lembaga keuangan bekerjasama dengan Trisakti Sustainability Center
3. Multi stakeholders dialogue “The Future of Sustainable Finance in Asia” bersama WWF Indonesia, Global Reporting Initiative Indonesia, OJK, Exim Bank.

CAPAIAN

1. Sosialisasi draft hasil penilaian dalam Workshop Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia
2. Multi stakeholders dialogue “The Future of Sustainable Finance in Asia” dalam People Summit for Alternative Development sebagai respon atas IMF/ World Bank Annual Meeting di Bali tahun 2018
3. Laporan hasil pemeringkatan akan dipublikasikan pada 2019



FAIR FINANCE ASIA (FFA)

Studi Kasus Akses Buruh Migran Indonesia di Hong Kong terhadap Layanan Remitansi dan Pemanfaatan Dana Remitansi oleh Keluarga Buruh Migran

1. Menganalisis akses buruh migran di Hong Kong terhadap layanan remitansi serta pemanfaatan dana remitansi oleh keluarga buruh migran
2. Pertemuan dengan para pemangku kepentingan terkait kebijakan layanan remitansi dan peran lembaga keuangan dalam mengurangi angka kemiskinan (Dewan Nasional Keuangan Nasional Inklusif, TNP2K)

ADVOKASI

Laporan hasil penelitian akan digunakan sebagai bahan advokasi ke lembaga keuangan, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya

3. JARINGAN DAN AFILIASI

3.1 Forum, Afiliasi Prakarsa & Research Associate

Perkumpulan Prakarsa membangun hubungan yang baik dan berkomunikasi secara aktif dengan lembaga-lembaga pemerintah dan parlemen, otoritas keuangan, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian nasional/daerah di Indonesia dan luar negeri, organisasi masyarakat sipil (nasional, daerah dan internasional), sektor swasta, kedutaan besar, organisasi internasional, dan lain-lain.

Perkumpulan Prakarsa mengupayakan kemitraan dalam kerja-kerja advokasi dalam bentuk forum, konsorsium dan/atau koalisi, dengan tujuan penguatan strategis dan kapasitas CSO untuk mendorong isu perubahan kebijakan di tingkat nasional. Perkumpulan Prakarsa mengutamakan potensi kemitraan di tingkat sub-nasional, baik dengan pemerintah maupun CSO lokal. Kemitraan yang dibangun merupakan relasi advokasi yang konstruktif dan kritis, serta independen untuk menguatkan aktor dan relasi dalam lingkup dan proses kebijakan di Indonesia.

INTERNATIONAL



Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) adalah Pusat penelitian ekonomi dibawah naungan *Oxford Department of International Development*, Universitas Oxford. Prakarsa bersama OPHI pada tahun 2014 menyelenggarakan penelitian Indeks Kemiskinan Muldimensi (Multidimensional Poverty Index/ MPI) di Indonesia.

Tax Justice Network (TJN) didirikan pada tahun 2003 sebagai lembaga independen yang fokus pada isu pajak. Prakarsa diundang bergabung dalam jaringan pajak berkeadilan lintas Negara pada 2011. Kegiatannya antara lain penelitian bersama, membuat Forum Pajak Berkeadilan Indonesia (FPBI), dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas CSO.



JustJobs Network adalah organisasi non-partisan yang memproduksi penelitian empiris untuk isu menciptakan pekerjaan yang layak. Prakarsa melakukan penelitian tentang Tenaga Kerja di ranah *On Demand Economy* khususnya Platform Transportasi Online. Fokus pada isu-isu ketenagakerjaan seperti kerja layak, ekonomi digital, *basic income*, dan lain sebagainya.

Fair Finance Guide International (FFGI), dipelopori di Belanda pada tahun 2009, FFGI adalah jaringan masyarakat sipil internasional yang diinisiasi oleh Oxfam Novib, untuk memperkuat komitmen bank dan institusi keuangan lainnya terhadap standar-standar sosial, lingkungan dan hak asasi manusia. Prakarsa menjadi bagian dari FFGI sejak tahun 2013, di level nasional Prakarsa menginisiasi pembentukan Koalisi Responsibank Indonesia.



Financial Transparency Coalition (FTC) adalah jaringan global yang bekerja untuk mengurangi aliran keuangan gelap melalui promosi transparansi, akuntabilitas, dan sistem keuangan internasional. FTC didirikan pada tahun 2009. Prakarsa merajut jaringan dengan FTC sejak tahun 2015 dan pada Maret 2018, status Prakarsa di dalam FTC bukan lagi jaringan, melainkan berganti menjadi anggota penuh FTC. Prakarsa pernah menghadiri rapat internasional untuk anggota dan jaringan FTC dua kali, pertama di Washington D.C pada tahun 2016 dan kedua di Helsinki pada tahun 2018.



Institute for Social Entrepreneurship in Asia (ISEA) adalah jaringan pembelajaran dan praktek pembelajaran yang diformulasikan oleh para *social enterprise* dan lembaga-lembaga sumber daya *social enterprise*. Di Indonesia, hanya ada 3 organisasi yang terdaftar sebagai anggota ISEA yakni, Prakarsa, Dompot Dhuafa, dan Bina Swadaya. Prakarsa bergabung dengan ISEA sejak tahun 2014 dan *concern* dengan isu-isu *social entrepreneurship*.

Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA), dibentuk pada tahun 2014. TAFJA adalah bagian dari *The Global Alliance for Tax Justice (GATJ)*. TAFJA merupakan ruang strategis bagi Prakarsa untuk menyemestakan gagasan-gagasan transparansi, demokrasi, dan redistribusi kekayaan di level kawasan. Sejak tahun 2014, Prakarsa duduk sebagai *co-chair* di regional Asia Tenggara.



NASIONAL

Policy Research Network (PRN) adalah koalisi yang terdiri dari CSO yang bergerak di bidang penelitian. Adapun CSO yang tergabung dalam koalisi ini diantaranya, CSIS, Paramadina Institute, Article 33, LPEM UI, KPPOD, WRI, YIPD, Prakarsa, dan lain sebagainya. Tujuan dari koalisi ini untuk memperkuat jaringan CSO yang bergerak di bidang penelitian, serta sebagai wadah untuk diseminasi pengetahuan yang dibangun.

Komisi Anggaran Independen (KAI), dibentuk pada tahun 2014. Tak lama berselang setelah dibentuk, komisi memproduksi sebuah “kertas kebijakan” untuk penyusunan APBN 2015. Pada tahun 2014, KAI juga pernah dimintai masukannya untuk tim transisi presiden terpilih, Joko Widodo. KAI pernah membantu merumuskan anggaran berbasis program tahun 2016 yang kemudian diterima oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Sejak tahun 2018 hingga saat ini, KAI mengalami “*vacuum*” sebab kesibukan urusan domestic dari setiap anggota komisi.

Green Economy Caucus DPR-RI (GEC DPR-RI) beranggotakan anggota DPR-RI dari lintas fraksi, dan didukung oleh unsur-unsur kelompok masyarakat yang peduli dan berusaha mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan sosial, serta ramah dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Prakarsa menginisiasi GEC DPR-RI pada tahun 2013. Inisiasi Prakarsa terwujud dalam tindakan mengajak anggota DPR RI untuk membuat GEC DPR-RI. Setelah terbentuk,

Prakarsa mendorong GEC DPR-RI untuk bergabung dalam jaringan parlemen dunia yang peduli terhadap isu-isu ekonomi hijau, Globe International dan terlibat dalam *Conference of The Parties under UN Framework Convention on Climate Change*.

Forum Pajak Berkeadilan Indonesia (FPBI) adalah jaringan lintas organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk menegakkan pajak yang berkeadilan di Indonesia melalui pemberantasan kejahatan pajak di Indonesia, baik *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Dibentuk pada tahun 2013 dan pada tahun 2014, FPBI memberikan usulan kepada calon presiden dan calon wakil presiden dari dua pasangan calon untuk memasukan pajak berkeadilan sebagai isu prioritas dalam program kerja pemerintahan.



Koalisi Responsibank Indonesia adalah bagian dari jaringan global *Fair Finance International*. Anggota Koalisi Responsibank saat ini adalah Perkumpulan Prakarsa, INFID (International NGOs Forum for Indonesian Development), PWYP (Publish What You Pay) Indonesia, YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) dan ICW (Indonesian Corruption Watch), -tetapi tidak menutup kemungkinan bagi organisasi lain yang memiliki kepedulian serupa untuk bergabung dimasa datang. Berdiri pada tahun 2014 atas inisiasi Prakarsa, salah satu advokasi yang berhasil dilakukan oleh ResponsiBank adalah kontribusinya pada diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Keuangan Berkelanjutan. Saat ini, ResponsiBank sedang melakukan advokasi terhadap RUU perbankan.

Koalisi Kerja Layak dibentuk pada tahun 2016 oleh Prakarsa, INFID, Universitas Indonesia, IRE, Lakpesdam NU, dan P3M. Koalisi ini aktif memperkaya wacana mengenai pentingnya *vocational & educational training* (VET) bagi angkatan kerja baik itu yang akan memasuki pasar kerja maupun yang sudah bekerja.

Forum Advokasi JKN (FAJ) fokus pada isu-isu kesehatan, khususnya sistem jaminan kesehatan nasional. Forum ini dibentuk pada pertengahan tahun 2016 atas inisiasi Prakarsa. Anggotanya yaitu Perkumpulan Prakarsa, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Indonesia (PELKESI), Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Article 33, BPJS Watch, Yayasan Persahabatan Indonesia Kanada (YAPPIKA), INFID, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Gagasanbesar forum ini adalah mewujudkan JKN yang berbasis prinsip *Universal Health Coverage* (UHC) yang sejati dan implementasi nilai-nilai JKN dalam UU SJSN secara menyeluruh.

Indonesia Tobacco Control Research Network merupakan gabungan dari masyarakat sipil, lembaga penelitian universitas dan international NGO yang memiliki concern pada pengendalian tembakau dari berbagai aspek seperti kesehatan, ekonomi, kemiskinan dan petani tembakau itu sendiri. ITCRN bekerja melalui tiga *working group* dalam menurunkan konsumsi rokok di Indonesia melalui advokasi KTR (Kawasan Tanpa Rokok), TAPS (Tobacco Advertisement Promotion and Sponsorships) banned dan kenaikan cukai dan harga rokok.

3.2 Kepercayaan Perguruan Tinggi Dalam Proses Magang

Salah satu komitmen Prakarsa sebagai salah satu lembaga penelitian, maka di tahun 2018 kami terbuka kepada mahasiswa yang ingin melakukan magang ataupun praktikum di Prakarsa. Namun, dalam proses penerimaan mahasiswa magang tetap dilakukan seleksi berdasarkan minat isu yang ingin diperdalam. Sepanjang 2018, terdapat dua orang mahasiswa yang berkesempatan magang di Prakarsa.

Melihat dari minat perguruan tinggi yang merekomendasikan mahasiswanya untuk melakukan magang di Prakarsa, maka hal tersebut merupakan kepercayaan mereka terhadap Prakarsa sebagai think-tank based NGO yang dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswanya.



UNIVERSITIES



FILANTROPIS



THINK-TANK



DEVELOPMENT AGENCIES



4. KELEMBAGAAN DAN KEUANGAN

Tahun 2018 merupakan tahun Perkumpulan Prakarsa terlibat kerjasama dalam berbagai jaringan internasional dan nasional untuk memperkuat produksi dan sharingnetwork expansion pengetahuan, advokasi kebijakan berbasis bukti dan pembiayaan dalam kerja-kerja kami. Pada tahun 2018, organisasi. Dengan bertambahnya jejaring dan program yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Prakarsa, tentunya membutuhkan dukungan sumber daya manusia, baik dari segi program maupun administrasi dan keuangan.

Meskipun tahun 2018 merupakan tahun yang cukup gemilang dalam perluasan jejaring dan program, namun secara internal organisasi, Perkumpulan Prakarsa mengalami tantangan yakni terjadi beberapa kali pergantian staf (turnover) pada posisi finance officer, finance assistant, social policy officer, sustainable development officer, serta HR and admin officer. Sepanjang tahun 2018 posisi research manager juga dirangkap sekaligus oleh program manager. Meski demikian, dengan adanya dinamika, adaptasi, dan koordinasi yang cukup matang antara staf lama dengan staf baru, berhasil membuat segala masalah dan tantangan dapat dikelola dengan baik.

4.1 Penguatan Internal Organisasi

Rapat Kerja

Prakarsa selalu mengagendakan rapat kerja pada January 2018. Pada rapat kerja tahun 2018, dibahas beberapa agenda yakni mengagendakan program-program dan riset yang akan berjalan di tahun 2018, membuat timeline, alokasi keuangan dan pembagian tim kerja. Selain itu dibahas juga SOP program, keuangan dan administrasi untuk dilihat kembali dan direvisi sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi.

Board Meeting

Di tahun 2018, Board Meeting dilaksanakan pada bulan Agustus 2018. Board Meeting menjadi indikator untuk memotret tata pengurusan internal Prakarsa. Penyelenggaraan Board Meeting merupakan mekanisme penting, karena board memainkan peran dalam membuat kebijakan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif. Agenda yang dibahas dalam rapat antara lain yakni pelaporan badan pengurus harian atas kinerja program dan pengelolaan keuangan. Selain itu, board juga menyampaikan tanggapannya untuk kemudian diberikan masukan perbaikan atau rencana strategis untuk tahun yang akan datang. Komunikasi dan komitmen yang dibangun antara badan pengurus harian dan board sangat penting untuk kemajuan Prakarsa.

Learning Day and English Day

Selama tahun 2018, Learning Day & English Day dilakukan secara regular 1-2 kali per bulan pada hari Jumat. Sebagai salah satu lembaga kajian dan penelitian, budaya belajar perlu terus dilakukan oleh internal staf Prakarsa. Setiap orang didorong untuk mampu berkomunikasi aktif berbahasa Inggris. Kami meluangkan waktu untuk sesi Learning Day selama 2 – 4 jam, diisi oleh internal staf maupun mengundang expert yang ahli di bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan. Terkadang kegiatan ini juga menjadi salah satu saluran kegiatan yang dapat diisi dengan games sehingga terjalin hubungan yang semakin erat antar staf. Kedepannya, Prakarsa berharap Learning Day bukan hanya

diperuntukkan bagi internal staf Prakarsa saja melainkan dapat diikuti oleh pihak luar seperti mahasiswa, CSO maupun lembaga lainnya sebagai pusat pembelajaran.

Diskusi Tematik

Prakarsa rutin mengadakan diskusi tematik baik di internal staf Praarsa maupun dengan pihak luar. Di Internal sendiri diskusi terintegrasi dalam kegiatan learning day. Sedangkan diskusi yang melibatkan pihak luar melibatkan forum-forum advokasi dengan narasumber terkait sesuai dengan tema yang dibahas. Kegiatan ini bukan hanya membahas isu-isu yang tengah dialami, namun juga sebagai upaya dalam merespon permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat.

5. PRAKARSA DALAM MEDIA Berita Online



Berita di Media Cetak

11 April 2018 Kesejahteraan Mitra Tak Terjamin (Kompas)
Eka Afrina

Opini di Media Cetak

- 3 Mei 2018 May Day Reflection on Job Quality (TheJakartaPost)
Victorya Fanggalda
- 9 Mei 2018 Jangan Abaikan Peringkat Kompleksitas Ekonomi (Kompas)
Rahmanda Muhammad Thaariq
- 24 Januari 2018 The Deaths of Over 65 Children in Asmat, Papua (Jakarta Post)
Victoria Vanggalda
- 21 Maret 2018 Does raising cigarette excise tax work? (TheJakartaPost)
Rahmanda Muhammad Thaariq
- 2 April 2018 SDGs dan Pembangunan (Kompas)
Setyo Budiantoro

16 Oktober 2018 "Infinity War" dan SDGs (Kompas)
Setyo Budiantoro

Talkshow

21 Maret 2018 Radio Talkshow Strategi dan Cara Menurunkan Ketimpangan Melalui Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), MNC Trijaya 104,6 FM
Herni Ramdlaningrum

23 Mei 2018 Wawancara dengan Kompas TV tentang kebijakan pemberian THR++ bagi pensiunan, PNS, TNI & Polri dan memberikan gaji ke-13 bagi PNS, TNI & Polri







PRAKARSA

Welfare Initiative for Better Societies

Jln. Rawa Bambu I Blok A No. 8-E
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Indonesia 12520

 +62 21 7811 798

 perkumpulan@theprakarsa.org

FOLLOW OUR SOCIAL MEDIA

 [perkumpulan Prakarsa](#)

 [theprakarsa](#)

 [theprakarsa](#)

 [Perkumpulan Prakarsa](#)

www.theprakarsa.org